

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- , 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- , 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press & PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- Bakti Setiawan, Dian, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah : Mekanisme Pemeberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiman, Arief, 2002, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Farida Indarti S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan I*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- H.M. Agus Santoso, 2013, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- J. Kaloh, 2003, *kepala daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku kepala daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.



-----, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku kepala daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

Jeddawi, Murtir, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah*, Total Media, Yogyakarta.

Lubis, M. Solly, 1983, *Pegeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.

-----, 2008, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Lubis, Marzuki, 2011, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD Dan Kepala daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Mahfud MD, Moh, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung.

Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Hukum Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.

-----, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet III, PSH FH UII, Yogyakarta.

Marbun, B.N. 2005, *DPRD Dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

MPR RI, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.

Rasyid Thalib, Abdul, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Ditingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

-----, 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.



- Saragih, Bintang R, 1988, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara, cetakan Ke tujuh*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2006, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, ed. Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri, dkk, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sujamto, 1993, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- , 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586).



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

C. Disertasi, Tesis, Skripsi.

Nurbaningsih, Enny, 2011, *“Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah, Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya”*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM

Livia Sikmon Putra, 2008, *Kajian Yuridis Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Pasca Pemilihan Langsung Dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi*, Tesis, Magister Hukum, UGM, Yogyakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Dasar Pemberhentian Kepala Daerah
RANGGA EKA J, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Cumbhadrika, Chitto, 2011, *Dinamika Penggunaan Hak Angket DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Ugm, Yogyakarta.

Tantowi, Andi, 2013, "Mekanisme Penggunaan Hak Angket di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.